



**SEMINAR NASIONAL TAHUN 2006
PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG**



Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung, Sabtu - 05 Agustus 2006

***Pendidikan IPS sebagai Wahana
Memupuk Modal Sosial Nasional***

PROSIDING SEMINAR



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG – 2006**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
05 Agustus 2006**

“Pendidikan IPS Sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional”



Editor:

Siti Fadjarajani
Kokom Komalasari
Yasmin

ISBN:

979-15127-0-1

*Isi makalah-makalah pada prosiding ini sepenuhnya tanggung jawab Penulis,
Editor hanya menyusun dan mengedit format penulisan.
Hak cipta dilindungi Undang-undang*

Penyelenggara dan Penerbit:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Indonesia membutuhkan modal sosial. Diperlukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan: Apa yang dapat dilakukan oleh “*Community of Scholars*” Pendidikan IPS, termasuk para guru dan dosen, dalam memupuk modal sosial masyarakat, bagaimana hal itu sebaiknya dilakukan? Kendala-kendala apa saja yang berpotensi menghambatnya, serta strategi apa sajakah yang diperlukan untuk merealisasikannya. Untuk itulah Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung merasa perlu menyelenggarakan Seminar Nasional Tahun 2006 dengan tajuk “*Pendidikan IPS Sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional*”.

Seminar Nasional Pendidikan IPS Tahun 2006 ini bertujuan untuk mengartikulasikan kepedulian komunitas ilmiah Pendidikan IPS dalam keikutsertaannya memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Selain itu juga untuk menemukan solusi mengatasi masalah menipisnya modal sosial masyarakat Indonesia melalui Pendidikan IPS, serta untuk membangkitkan kembali kesadaran para pelaku pendidikan, baik secara kelembagaan (LPTK dan sekolah-sekolah) maupun secara individual (para guru dan dosen) akan martabat dan arti penting Pendidikan IPS.

Seminar Nasional Pendidikan IPS Tahun 2006 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wadah interaksi, antar Mahasiswa, Guru, Dosen, Peneliti, Ilmuwan, Pengambil Keputusan di Lembaga-Lembaga Pendidikan, Pengamat Masalah Sosial, serta Masyarakat yang peduli dengan pendidikan dan masalah sosial. Prosiding ini merupakan salah satu hasil seminar nasional yang berisikan makalah-makalah penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Akhirnya, semoga kegiatan seminar ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan semua pihak hingga terselenggara dan lancarnya kegiatan ini, disertai permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan seminar nasional ini.

Bandung, 05 Agustus 2006
Ketua Panitia,

Siti Fadjarajani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Rekonstruksi Modal Sosial di Era Reformasi Melalui Integrasi Ilmu Pendidikan Dengan Pendidikan IPS di Institusi Pendidikan <i>Drs. Abdul Hadis, M.Pd.</i>	AH 01-08
Pendidikan IPS Sebagai Model Pendidikan Multikultural <i>Prof. DR. Abu Su'ud</i>	AS 01-07
<i>Agency dan Mentalite: Pendekatan Dalam Memahami Perubahan Sosial</i> <i>Dr. Agus Mulyana, M.Hum.</i>	AM 01-11
Transformasi dan Internalisasi Nilai Disiplin Ilmu sebagai Investasi Modal Sosial Nasional <i>Drs. Benny A. Benyamin, M.Pd.</i>	BB 01-13
<i>On Cooperation and Competition: Interdependence Psychology</i> <i>Dr. Cholichul Hadi</i>	CC 01-22
Pentingnya Pemahaman Dini Makna Pluralitas Dalam Masyarakat Indonesia Sebagai Pendukung Pendidikan Sosial-Budaya <i>Ekna Satriyati, SS., M.Hum.</i>	ES 01-10
Hubungan Guru Dan Murid Terhadap Perkembangan Pendidikan Dalam Menunjang Kepribadian Anak <i>Dyah Satya Yoga Agustin</i>	DS 01-11
Kontribusi Pendidikan Geografi dalam Mengembangkan Modal Sosial untuk Menuju Keunggulan Bangsa dan Bernegara <i>Dr. Enok Maryani M.Si.</i>	EM 01-10
Disiplin Geografi Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Mengembangkan Modal Sosial <i>Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S.</i>	BA 01-08

Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS (Sebuah Sarana Alternatif Menuju masyarakat Madani) Isnarmi Moeis	IM 01-10
Pengembangan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan IPS Di Era Global Kokom Komalasari, M.Pd.	KK 01-12
Strategi Penguatan Modal Sosial Melalui Pendidikan (Belajar Dari Masyarakat Desa) Dr. Kushandajani	KH 01-10
Konflik Ruang Publik Dan Penguatan Modal Sosial (<i>Social Capital</i>) Masyarakat Kampung Kota (Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan Di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung) Lilis Widaningsih, S.Pd., MT.	LW 01-12
Memupuk Modal Sosial Nasional Dengan Melalui Pendidikan IPS: Aplikasi Kerjasama (<i>Cooperation</i>) Dalam Pendidikan IPS Lucy Yosita, ST., MT.	LY 01-12
Model Pembelajaran Holistik dalam Pengembangan Keterampilan Berfikir Kesejarahan Murni, Dra., MA.	MN 01-33
Penggunaan Media Kartun dalam Pembelajaran Nana Supriatna dan Ikeu Hermi	NS 01-07
Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial Pupu Saeful Rahmat, Drs., M.Pd.	PS 01-05
Objektivikasi Pancasila Sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Samsuri, M.Ag.	SS 01-10
Komputer Akuntansi Dra. Silviana Agustami, M.Si. Ak.	SA 01-05

Paradigma Baru Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan Global <i>Siti Fadjarajani, MT.</i>	SF 01-10
Tanggungjawab Ilmu Menurut Teori Kritis dan Relevansinya Di Indonesia Soedarso, M.Hum.	SD 01-07
Rekonstruksi Pendidikan IPS Pada Sekolah-Sekolah di Bali Dalam Rangka Ajeg Bali (Suatu Kajian Sosio Budaya Terhadap Pengembangan Program Pendidikan IPS di Bali) <i>Drs. Sukadi, M.Pd., M.Ed.</i>	SK 01-13
Pengembangan Sikap Demokrasi Siswa Sekolah Dasar Pada Pelajaran PKNPS <i>Dr. Tukiran</i>	TK 01-08
Wacana Pendidikan Multikultural (Suatu Analisis terhadap masalah- masalah sosial) <i>Windiani, M.Si.</i>	WD 01-07



SEMINAR NASIONAL TAHUN 2006
PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG
“Pendidikan IPS sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional”
Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung, Sabtu - 05 Agustus 2006



STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN
(BELAJAR DARI MASYARAKAT DESA)

Oleh:

Dr. Kushandajani

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Semarang.

lp2msmg@gmail.com

ABSTRAK

Di saat efek globalisasi melanda semua dimensi dari manusia, menjadikan individualisme mengeras, hak-hak komunal terabaikan, ikatan-ikatan menjadi begitu longgar, dan modal sosial tergerus karenanya, maka penting kiranya menyusun sebuah strategi adaptif agar kondisi bangsa bisa pulih bahkan bisa duduk sejajar penuh percaya diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh adalah bagaimana menumbuhkembangkan dan sekaligus menguatkan modal sosial bangsa. Realitas sosial menunjukkan social capital (modal sosial) selalu tumbuh dan berkembang beriringan dengan tumbuhnya komunitas. Modal sosial dapat membekas secara laten dalam kelompok dan muncul sebagai energi potensial. Melalui modal sosial terbangun rasa saling percaya (mutual trust), hubungan timbal balik (reciprocity) seperti saling menghormati, saling berbagi dan tumbuhnya emosi-emosi positif bagi berlangsungnya transformasi sosial yang lebih baik.

Salah satu bidang yang diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan modal sosial adalah bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan formal atau sekolah saja, tetapi juga mencakup arti pendidikan secara luas. Sekolah ataupun perguruan tinggi hanya merupakan salah satu agen sosialisasi bagi tumbuhkembangnya modal sosial, selain agen-agen penting lainnya seperti keluarga dan media massa. Dukungan secara luas dari semua agen akan memberikan efek yang lebih luas dalam menumbuhkembangkan sekaligus menguatkan modal sosial bangsa.

Diawali dari perubahan cara berpikir di dalam keluarga, para pendidik, dan pengelola media massa, tentang pentingnya menguatkan modal sosial. Perubahan cara berpikir yang nantinya berakibat pada perubahan sikap mental merupakan tahapan yang paling kritis dan paling sulit dalam proses transformasi sosial, karena hal tersebut menyangkut perubahan nilai, kebiasaan, bahkan keyakinan. Kesiediaan untuk mengubah diri secara individual harus dibarengi pula dengan merekonstruksi sistem pendidikan agar lebih kondusif, seperti masuknya muatan konsep maupun praktek modal sosial di dalam kurikulum sekolah sampai perguruan tinggi.

Penguatan modal sosial melalui pendidikan dilakukan melalui tiga komponen: jaringan kerja sosial, norma sosial, dan sanksi. Di dalam jaringan kerja sosial, peserta didik dikuatkan akses terhadap informasi. Di dalam norma sosial, aturan-aturan yang berlaku dikuatkan agar menghasilkan hubungan timbal balik yang positif, munculnya harapan bagi kerjasama, kepercayaan, dan perilaku positif. Adapun di dalam sanksi, anak didik mentaati hukuman bagi pelanggaran dan penghargaan bagi kepatuhan.

Tumbuhkembangnya modal sosial di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat akan menentukan seberapa besar kepercayaan masyarakat pada aktor-aktor maupun lembaga-lembaga yang menyandang atribut kekuasaan, pada proses-proses sosial-politik, dan pada policy yang dihasilkan negara. Dengan modal kepercayaan yang tinggi akan mendorong terjadinya aksi sosial (social action) untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Kata kunci: modal sosial, transformasi sosial, pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Solusi pembelajaran bisa kita temukan dari jawaban tiga pertanyaan:

Pertama, apa yang bisa kita lakukan?

Kedua, apa yang bisa kita baca?

Ketiga, siapa yang bisa kita tanya?

Pernyataan bijak tersebut menjadi sumber inspirasi bagi ditemukannya solusi pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang sampai saat ini selalu dirundung masalah. Efek globalisasi yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik, justru malah menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang "kalah" dan hanya jadi "objek" eksploitasi dari negara-negara maju berkapital besar.

Untuk itulah dibutuhkan berbagai pemikiran yang bisa diikuti dengan tindakan strategis untuk bisa memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Tentu saja sebagai gagasan atau ide dibutuhkan berbagai "ujian" dan juga komitmen agar ide ataupun gagasan yang diajukan dapat dilaksanakan. Dalam uraian berikut dipaparkan berbagai pemahaman konsep tentang modal sosial, praktek modal sosial di desa sebagai bahan renungan untuk diambil hikmahnya, sampai dengan strategi penguatan modal sosial melalui pendidikan.

B. MODAL SOSIAL: MENGAPA BEGITU PENTING?

Konsep *social capital* atau modal sosial pertama kali muncul melalui hasil pemikiran Hanifan, yang mengartikan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. (Syahra, 2003: 1-20) Modal sosial termasuk kemauan baik, rasa

bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Berbeda dengan Hanifan, maka Pierre Bourdieu dalam tulisannya yang berjudul *The Forms of Capital* (1986) melihat pentingnya pembahasan modal dalam segala bentuknya untuk lebih memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial. Modal ekonomi dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Modal budaya dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilembagakan seperti kualifikasi pendidikan. Modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi. Modal sosial merupakan keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap yang didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.

Di tahun 1988 Coleman dalam tulisannya *Social Capital in the Creation of Human Capital* memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengkaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (menggunakan prinsip ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial). (Portes and Landolt, 2000: 529-547) Ia menggambarkan bagaimana *social capital* berperan dalam menciptakan *human capital* dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak. Terdapat dua aspek struktur sosial yang memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pilar atau unsur modal sosial adalah: (1) kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial; (2) pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat; (3) adanya norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Bagi Putnam (dalam *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, 1993) modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Alasannya: (1) adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat; (2) kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial akan memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu; (3) berbagai keberhasilan akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial dilakukan oleh Fukuyama di dalam bukunya yang berjudul *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (1995). Fukuyama melihat bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam satu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan dengan akar budaya, terutama berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Peraturan, kontrak, dan rasionalitas ekonomi semata tidak menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada perhitungan rasional. Kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat. Keberlangsungan hidup organisasi dan kelembagaan besar ekonomi juga ditentukan oleh masyarakat sipil (*civil society*) yang sehat dan dinamis, yang pada gilirannya tergantung pula pada adat kebiasaan dan etika, sebagai hal-hal yang hanya bisa terbentuk secara tidak langsung dengan adanya kemauan untuk itu, serta adanya kesadaran yang semakin besar dan penghargaan terhadap budaya.

C. GAMBARAN MODAL SOSIAL DI DESA

Secara sosiologis, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1982: 89), selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*). (L.L. Fuller dalam Soekanto: 90; Chambliss and Seidman, 1971: 9) Akan tetapi dari sejarah hukum pemberlakuan berbagai peraturan negara tentang desa justru sebaliknya memperlihatkan adanya “*criminogenic*”. Modal sosial desa yang selama ini dibangun oleh masyarakat atau komunitas tergerus karena pemberlakuan kebijakan negara. Kepercayaan satu sama lain, kepedulian satu sama lain, kegiatan saling berbalas secara positif berubah menjadi konflik antar individu ataupun kelompok untuk mendapatkan modal ekonomi. Peraturan-peraturan yang ada ditempatkan lebih sebagai alat kontrol, dimana tujuan utamanya adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan peraturan yang seragam, akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol terhadap pemerintah-pemerintah bawahannya. Struktur pemerintahan desa dibangun semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mengabaikan nilai-nilai lokal yang justru menjadi dasar bagi kehidupan bersama masyarakat desa. *Legal gap* (Wignjosoebroto, 2002: 364-365) atau celah selisih kepaahaman dan/atau keyakinan antara apa yang “dikehendaki” oleh para penganut kekuasaan negara agar dipatuhi, dengan apa yang masih diyakini dan dipatuhi dalam praktek, sebagai tradisi sehari-hari oleh warga masyarakat setempat terjadi.

Padahal masyarakat desa sebenarnya memiliki “otonomi” yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah. (Surianingrat, 1980: 14) Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. (Hoessein, 2001: 38) Dengan demikian, desentralisasi semestinya dilihat tidak saja sebagai proses pembukaan ruang secara politik, ekonomi dan hukum saja, tetapi juga menyentuh ruang sosial dan budaya lokal. Pelibatan dimensi *modal sosial* dalam penciptaan tatakelola (*governance*) pemerintahan desa menjadi sangat penting, karena kesediaan suatu kebudayaan untuk menerima perubahan akan menjadi lebih besar jikalau perubahan itu tidak menimbulkan kesukaran besar dalam penyesuaiannya ke dalam susunan yang lama. (Soedjatmoko, 1984: 14)

Kegiatan *merti dusun* misalnya, merupakan kegiatan nyata yang dapat membangun dan menumbuhkembangkan modal sosial di desa. Tingkatan kepercayaan satu sama lain dapat terlihat ketika mereka menyiapkan acara tersebut. Adanya kerelaan yang sangat besar untuk memberikan sebagian pendapatan untuk menyiapkan sajian bersama. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang telah diberikan pada acara tersebut memiliki nuansa “ibadah”, dan Allah akan membalas dengan hasil panen yang lebih baik di tahun berikutnya.

Pada saat itulah modal sosial muncul, kapasitas bertindak dan fasilitas produksi meningkat. Kegiatan *merti dusun* ibarat sumber energi bagi masyarakat desa. Masyarakat melakukan kegiatan bersama tersebut karena adanya dorongan kebutuhan akan “energi” baru untuk melakukan aktivitas yang lebih baik di masa mendatang. Pada saat modal sosial aktif, maka akan memfasilitasi tujuan anggota kelompok maupun kelompok secara keseluruhan. Modal sosial dapat membekas secara laten dalam kelompok dan muncul sebagai energi potensial.

Apa yang akan diterima oleh anggota masyarakat jika dia tidak mengikuti kegiatan bersama? Oleh karena kegiatan-kegiatan bersama dilakukan atas dasar kerelaan, maka kemungkinan menjadi sangat kecil bagi anggota masyarakat untuk mengabaikan kegiatan tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan *merti dusun* ibarat sumber energi bagi masyarakat desa. Maka bagi orang-orang yang tidak melakukan kegiatan tersebut merasa tidak mendapatkan curahan energi baru bagi kegiatan-kegiatannya di masa mendatang. Keinginan dari para anggota masyarakat, bahkan yang pergi ke luar desa untuk bekerja ataupun belajar, selalu menyempatkan dirinya untuk mengikuti acara tersebut. Keinginan untuk memperbaharui ikatan di antara anggota masyarakat desa sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan bersama tidak tampak. Yang muncul adalah sanksi yang datang dari diri sendiri, dalam bentuk penyesalan pribadi. Sanksi tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk pengendalian sosial.

Secara ringkas hasil studi menunjukkan berbagai temuan menarik. **Pertama**, di dalam masyarakat desa masih menunjukkan tumbuhkembang modal sosial yang kuat. Nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat desa, seperti nilai kejujuran, kepercayaan, maupun keharmonisan masih kuat tertanam. Dari nilai-

nilai tersebut tumbuh sikap saling mempercayai, saling berbagi, saling balas membantu, kerjasama, dan saling terikat satu sama lain, yang biasa disebut dengan modal sosial. Dari modal sosial yang ada melahirkan berbagai tindakan sosial seperti gotong royong, *merti dusun*, rebug warga, dan kegiatan sosial yang lain. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut terwadahi dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi yang dibentuk atas inisiasi masyarakat desa setempat.

Kedua, masyarakat desa mampu mengkonversi modal sosial menjadi modal ekonomi. Lembaga pengajian Al-Hidayah (di Dusun Kandangan) yang beranggotakan para wanita, merupakan contoh kongkrit dari modal sosial desa yang mampu mengatasi kemiskinan masyarakatnya. Terbatasnya sumberdaya alam dan ketiadaan kaum lelaki dewasa di dusun, tidak menyebabkan kaum perempuan dan anak-anak tidak mampu melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Kelompok Tani Makmur (di Dusun Krajan) juga mampu mengatasi keterbatasan di bidang pertanian, seperti terbatasnya air dan pupuk. Adapun Lembaga Keuangan Desa (di Dusun Krajan) mampu menyediakan dana bagi para anggotanya untuk digunakan sebagai modal usaha rumah tangga.

Ketiga, kemampuan masyarakat desa mengkonversi modal sosial yang ada menjadi modal pemerintahan. Aplikasi modal sosial di dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat desa memberikan gambaran tentang sudah terbentuknya modal pemerintahan di dalam masyarakat desa. Kemampuan mengambil keputusan melalui proses-proses yang saling mempercayai dan saling menghormati di antara mereka, juga proses mencegah dan mengatasi konflik, adalah sekian diantara modal pemerintahan yang terbentuk dari adanya modal sosial desa.

D. MEMBANGUN MODAL SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN

Dari memahami konsep dan praktek modal sosial di desa tersebut, maka dapat diambil beberapa gagasan dalam rangka memperkuat modal sosial bangsa melalui pendidikan. Dalam kaitan dengan penguatan modal sosial inilah, maka akan diuraikan beberapa pemikiran penting berkaitan dengan komponen-komponen modal sosial yang meliputi: jaringan kerja sosial, norma sosial, dan sanksi. Di dalam jaringan kerja sosial, para pendidik maupun peserta didik dikuatkan akses terhadap informasi. Di dalam norma sosial, aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) dikuatkan agar menghasilkan hubungan timbal balik yang positif, munculnya harapan bagi kerjasama, kepercayaan, dan perilaku positif. Adapun di dalam sanksi, para peserta didik mentaati hukuman bagi pelanggaran dan penghargaan bagi kepatuhan.

1. Jaringan Kerja Sosial

Terbatasnya akses informasi baik bagi pendidik maupun peserta didik merupakan petaka di dunia pendidikan. Bagaimana mungkin seorang dosen bisa tampil percaya diri di depan kelas tanpa penguasaan terhadap materi

kuliah sekaligus fenomena sosial yang sedang terjadi? Dibutuhkan jaringan kerjasama baik bersifat individu maupun kelembagaan, yang memungkinkan setiap pendidik memiliki akses individu maupun institusi terhadap dunia luar. Melalui akses yang dibangun akan terjadi transformasi informasi yang berkesinambungan.

Jaringan kerja sosial bisa berbentuk jaringan antar personal, jaringan antara individu dan institusi, ataupun jaringan antar institusi. Jaringan antar personal merupakan basis bagi semua bentuk jaringan sosial. Meskipun dibuka jaringan antar institusi sekalipun, tetaplah yang terlibat jaringan adalah orang perorang yang mewakilinya. Pertanyaan penting dalam jaringan antara individu dan institusi adalah: apa yang institusi lakukan untuk individu dan apa yang dilakukan individu untuk institusi?

Seberapa luas akses yang dimiliki individu maupun institusi akan menentukan ruang lingkup pembangunan modal sosial. Lingkup terbangunnya modal sosial diharapkan tidak hanya sekedar *bonding*, tetapi meluas ke bentuk *bridging* bahkan sampai *linking*.

2. Norma Sosial

Norma biasa disebut pula dengan kaidah sosial, yang pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaidah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan dapat dihindarkan bentrokan antar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Norma sosial tidak bisa dipisahkan dari jaringan kerja sosial, karena dengan terbentuknya jaringan kerja sosial maka terbangunlah norma sosial. Ada tiga (3) hal penting yang menyangkut norma sosial. (Lawang, 2005: 70) Pertama, norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Kedua, norma bersifat resiprokal, dimana isi norma menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Ketiga, jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan para pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan.

3. Sanksi

Sanksi sebenarnya merupakan reaksi, akibat atau konsekwensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan (ganjaran) seperti rasa hormat, simpati, dan pemberian penghargaan. Adapun sanksi yang bersifat negatif berupa hukuman seperti sikap antipati, celaan atau pidana. Secara umum, pengertian sanksi adalah yang bersifat negatif. Dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran

kaidah sosial. Adapun penghargaan digunakan untuk mendorong atau merangsang agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaidah sosial atau norma yang ada. Dengan demikian pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah, agar kembali pada keadaan semula. Disinilah konsep pengendalian sosial dikenalkan.

Pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (Soekanto, 1986: 92) Pengendalian sosial bertujuan agar perilaku warga masyarakat tidak terlalu menyimpang sehingga mungkin akan menggoyahkan integrasi kehidupan bersama yang dianggap wajar. Tujuan utamanya adalah menjaga keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi. Menjaga keserasian tersebut disebut pula dengan pengendalian sosial.

Cara-cara pengendalian sosial dapat bermacam-macam, seperti:

1. mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah sosial tertentu;
2. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah sosial tertentu, dengan menerapkan sanksi-sanksi positif;
3. mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat, apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial tertentu;
4. menimbulkan rasa takut;
5. menyusun perangkat aturan-aturan hukum.

E. BEBERAPA KENDALA

Ada beberapa kendala dalam menerapkan muatan modal sosial, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Pertama, dengan memisahkan secara tegas IPA dan IPS dibarengi dengan memasukkan modal sosial (hanya) sebagai bagian dari kajian IPS membuat ruang gerak menjadi terbatas. Sebenarnya muatan tentang modal sosial baik teori maupun praktek bisa masuk ke dalam segala ruang mata pelajaran maupun mata kuliah. Ini menyangkut perubahan kurikulum. Jika ingin memberikan efek yang kuat, maka pada setiap mata pelajaran dari SD sampai SMA mengandung muatan modal sosial yang dikemas menarik dan bisa menyentuh sanubari setiap anak didik.

Kedua, terbatasnya wawasan dan pengalaman bagi tenaga pengajar termasuk pula penggunaan teknik-teknik pengajaran yang menarik. Apapun jenis mata pelajaran, jika tidak dikemas secara menarik dengan tenaga pendidik yang trampil dan memiliki *empathy* yang kuat, maka pelajaran tidak akan menggugah kesadaran peserta didik..

Ketiga, belum terbangunnya komitmen bersama untuk perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan (sekolah sampai perguruan tinggi) menjadi tidak bermakna jika tidak didukung semua *stakeholders*. Peran

keluarga sangat penting dalam membangun karakter seorang anak didik. Belum lagi peran media massa yang sangat dominan dalam mentransfer pengetahuan. Harus diingat bahwa penguatan modal sosial tidak hanya dibangun lewat pendidikan saja tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti: sejarah dan budaya, struktur sosial, keluarga, pembangunan lingkungan, mobilitas penduduk, kesenjangan ekonomi dan kelas sosial, kekuatan dan karakter *civil society*, dan juga pola konsumsi individu maupun nilai-nilai *person*.

F. PENUTUP

Setiap gagasan yang disampaikan jika tidak dibarengi dengan pembangunan komitmen akan menjadi gagasan yang “mati suri”. Demikian pula dengan gagasan membangun modal sosial melalui pendidikan. Untuk itulah penting kiranya untuk melakukan langkah awal, melalui pembangunan jaringan kerja antar perguruan tinggi, untuk selanjutnya mendiskusikan bagaimana memformulasikan muatan modal sosial ke dalam kurikulum perguruan tinggi.

Sebagai penutup, bisa kita renungkan bersama kalimat-kalimat bijak ini:

Bacalah buku maka anda akan menuai “gagasan”;
Taburlah gagasan maka anda akan menuai “pemikiran”;
Taburlah pemikiran maka anda akan menuai “tindakan”;
Taburlah tindakan maka anda akan menuai “kebiasaan”;
Taburlah kebiasaan maka anda akan menuai “karakter”;
Taburlah karakter dan anda akan menuai “masa depan”.

Itulah yang kita harapkan bersama, dimana melalui penguatan modal sosial akan terbangun nantinya karakter bangsa Indonesia yang percaya diri sehingga bisa menuai masa depan yang lebih baik. Amin.

ACUAN PUSTAKA

- Chambliss, William J. And Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power*. Addison: Wesley Publishing Company. 1971.
- Hoessein, Bhenyamin. “Transparansi Pemerintahan-Mencari Format dan Konsep Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”. *Majalah Forum Inovasi*, November 2001, hal. 38,
- Lawang, Robert M.Z. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Jakarta: FISIP UI Press.2005.
- Paxton, Pamela. “Is Social Capital Declining in The United States ? A Multiple Indicator Assessment”. *American Journal of Sociology*, Vol. 105 No. 1, July 1999: 88-127.
- “Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship”, *American Sociological Review*. Vol. 67 , April: 254-277.
- Portes, Alejandro and Patricia Landolt. “Social Capital: Promise and Pitfalls of its Role in Development ”. *Journal of Latin America Studies*, May 2000, pp. 529-547.

- Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. ed-6. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Surianingrat, Bayu. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*. Jakarta: Metro Pos, 1980.
- Syakra, Rusydi. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. V No. 1.2003.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wilson, Edward O. *Consilience: The Unity of Knowledge*. New York: Alfred A. Knopf, 1998.